

## ABSTRAK

**Muhammad Zainal Layfani**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Kota Kediri  
zlayfani36@gmail.com

Kebijakan publik adalah cara dari pemerintah yang disepakati bersama untuk memenuhi tanggung jawab, seperti melindungi hak-hak dari masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Dunia pada sekarang ini sedang dilanda oleh wabah *corona virus disease 2019* atau sering disebut Covid-19. Membuat berbagai sektor menjadi berantakan, tak terkecuali sektor ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian membuat kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Dimana peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Banyak dari masyarakat dirugikan akibat dari pandemi ini, terlebih sektor UMKM yang juga menjadi roda perekonomian nasional. Pelaku UMKM menjadi berkurang penghasilannya karena adanya virus corona dan kebijakan pembatasan-pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode yang berusaha menafsirkan dan memahami makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 banyak merugikan pelaku UMKM, karena penghasilan mereka menjadi berkurang akibat dari pembatasan jam operasional dan pembatasan pengunjung atau tidak diperbolehkan adanya kerumunan. Para pelaku UMKM berharap agar pemerintah segera mengatasi penyebaran Covid-19 sehingga perekonomian mereka menjadi normal seperti sediakala.

**Kata Kunci:** Kebijakan publik, Peraturan Gubernur, Covid-19, dan UMKM